



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG
DI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR: 134.4/122/KS/425.011/2019
NOMOR: IMI-UM.01.01-4741

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-09-2019) yang bertanda tangan dibawah ini:

- HADI ZAINAL ABIDIN** : Walikota Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5973 Tahun 2018 yang berkedudukan di Kantor Walikota Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- RONNY F. SOMPIE** : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
16. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di Kota Probolinggo, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **Ketentuan Umum**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut unit kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Pegawai dengan status dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
6. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.
7. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.
8. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas adalah apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat.

9. Kepentingan yang lebih luas adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan, dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.
10. Stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di Kota Probolinggo dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan pemberian pelayanan keimigrasian di Kota Probolinggo.
- (2) Yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah penggunaan gedung/kantor beserta sarana prasarana yang digunakan oleh PIHAK KEDUA, penggunaan mana tidak diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya yang mengatur tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah mulai pasal 152 sampai dengan pasal 168, sehingga PARA PIHAK memandang perlu untuk mengatur penggunaan Gedung/ Kantor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
Gedung dan Kantor

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.
- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (4) Gedung/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri di atas tanah Pemerintah Kota dengan status Hak Pakai, tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 44 Kota Probolinggo berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00088.

Pasal 5
Rincian Gedung/Kantor

Gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. Ruang kerja pegawai;
- b. Ruang kerja penyelia;
- c. Ruang kerja pelayanan;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang cetak;
- f. Ruang server;
- g. Ruang genzet; dan
- h. Ruang arsip.

Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung

- (1) PIHAK KESATU tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, kecuali jika PARA PIHAK sepakat memindahkan gedung ke tempat yang disepakati.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KESATU mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI);
 - b. Aplikasi pelayanan izin tinggal (*e-office*); dan
 - c. Jaringan internet PT. Telkom.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) PIHAK KESATU menyediakan sarana prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - a. Jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat router dan firewall;
 - b. Jaringan LAN;
 - c. *Server*;
 - d. *Hardware* untuk aplikasi SPPRI; dan
 - e. *Hardware* untuk aplikasi pelayanan izin tinggal.

- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU juga menyediakan sarana perkantoran sebagaimana berikut :
 - a. Perabotan kantor (*office furniture*);
 - b. Mesin foto copy;
 - c. Brankas;
 - d. Genzet;
 - e. Rumah dinas, dan
 - f. Kendaraan operasional roda 4 (empat).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PIHAK KESATU juga menanggung biaya operasional kantor, kebersihan, dan keamanan.

Pasal 8 Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh PIHAK KESATU dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban PIHAK KESATU.

Pasal 9 Penugasan Pegawai

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan pegawai pemerintah kota yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di unit kerja.
- (3) Jumlah pegawai pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Selain menugaskan pegawai PIHAK KESATU harus juga menugaskan tenaga honorer sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan.

Pasal 10 Penggantian Penyelia dan Pegawai

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sesudah penggantian dilaksanakan.

- (3) Penggantian pegawai pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan penggantian pegawai pemerintah kota kepada PIHAK KESATU berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11
Ketentuan Penugasan

Penugasan Penyelia dan pegawai pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 12
Pelatihan Pegawai

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dan unit kerja bagi pegawai pemerintah kota yang dipekerjakan di unit kerja.
- (2) Biaya penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13
Rincian Pelatihan

Pelatihan fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-dasar keimigrasian;
- b. Hukum keimigrasian;
- c. Dokumen perjalanan;
- d. Izin tinggal;
- e. Pengawasan keimigrasian, dan
- f. Sistem informasi manajemen keimigrasian.

Pasal 14
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK KEDUA.

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.

- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.

Pasal 16
Pembiayaan

Semua biaya penyediaan sarana prasarana pendukung kesisteman, penyediaan sarana perkantoran, biaya pemeliharaan sarana prasarana serta biaya operasional kantor, kebersihan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 17
Adendum

Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 18
Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan kantor imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 19
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 20
Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya kesepahaman demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarakan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang mengatur tentang penggunaan wewenang diskresi yang dimiliki PARA PIHAK dengan tujuan:
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Mengisi kekosongan hukum;
 - c. Memberikan kepastian hukum; dan
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- (2) Bilamana di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi yang mengatur mengenai kesepakatan PARA PIHAK dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan perjanjian ini agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

